

Peran LPPSLH Dalam Pemberdayaan Petani Melalui Pendampingan Pembuatan Gula Kelapa Organik

Ageng Widodo

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

widodoageng009@gmail.com

Andriyan Fathul Anhar

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

andriandriyan611@gmail.com

Abstract

The coconut farming sector is a strategic potential to be developed. The purpose of this study was to determine the empowerment carried out by LPPSLH on coconut farmers through assistance in the manufacture of organic sugar. This research was conducted in Arenan Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency. The research method used descriptive qualitative. The methods used are assessment, certification, and practice. The results showed that the empowerment of LPPSLH was carried out by assessing farmers' problems, conducting advocacy, product improvement and marketing education. From these various empowerment efforts, it appears that there is a change in behavior that is more environmentally friendly, the land has been certified and farmers are able to make organic sugar independently.

Keywords: The Role of LPPSH, Empowerment, Coconut Farmers.

Abstrak

Sektor pertanian kelapa menjadi potensi yang strategis untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemberdayaan yang dilakukan LPPSLH terhadap petani kelapa melalui pendampingan pembuatan gula organik. Penelitian ini dilakukan di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Adapun metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah assesment, sertifikasi, dan praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan LPPSLH dilakukan dengan proses *assessment* permasalahan petani, melakukan advokasi, peningkatan produk dan pendampingan pemasaran. Dari berbagai upaya pemberdayaan tersebut tampak adanya perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan, lahan telah disertifikasi dan petani mampu membuat gula organik secara mandiri.

Kata Kunci: Peran LPPSH, Pemberdayaan, Petani Kelapa

Pendahuluan

Masyarakat sesungguhnya basis utama sebuah bangsa atau negara, bahkan juga merupakan pilar dan tolak ukur utama bagi sebuah bangsa itu sendiri, untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara. Terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang banyak menysasar, terutama masyarakat menengah kebawah dalam bidang ekonomi dan masyarakat luas pada umumnya (Alfitri, 2011).

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan rata-rata dan lainnya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Bruto* (PDB) untuk tingkat dan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) untuk tingkat wilayah.

Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan hasil dalam kehidupan masyarakat (Arfianto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran, walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam penerapannya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat, karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi (Noor, 2011).

Dalam pengertian ekonomi, desa diartikan sebagai tempat hidup dalam ikatan keluarga di suatu kelompok rumah dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama (Hayami, 1987).

Kondisi kondisi seperti itu yang merupakan alasan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Keterbelakangan yang ada di desa menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan antar masyarakat. Kemudian adanya budaya di masyarakat desa juga memicu pola pikir dan karakter masyarakat di desa.

Adapun tujuan-tujuan dan pemberdayaan desa sebagai berikut (1) Mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan desentralisasi pemerintah serta membantu percepatan dan pemulihan dampak krisis. (2) Memberdayakan masyarakat desa untuk turut berperan aktif dalam membangun daerah. (3) Meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, ketataprajaan, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan pada tingkat kabupaten. (4) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar. (5) Menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal. (6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana dasar (Maschab, 1992).

Pemberdayaan masyarakat penting kiranya memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat mampu mengelola potensinya sendiri tanpa harus bergantung pada pihak luar misalnya pemerintah dan perusahaan. Setelah dilakukan proses *assessment* diketahui bahwa desa arenan memiliki potensi tanaman kelapa yang banyak tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, subyek pemberdayaan adalah petani kelapa perlu dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dibidang pangan menjadi isu strategis untuk dikembangkan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok selain papan. Selama masih ada kehidupan, manusia pasti membutuhkan pangan. Namun, ketahanan pangan di Indonesia bisa dikatakan masih kurang. Hal ini karena tidak seimbangnya komposisi antar kebutuhan pangan masyarakat, dimana konsumsi beras masih terlalu tinggi sedangkan konsumsi pangan hewani, sayuran serta buah-buahan masih rendah. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Pemerintah melakukan penyelenggaraan pangan. Penyelenggaraan pangan ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta

keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Tanaman kelapa merupakan sumber penghasilan utama dari sebagian petani Desa Arenan. kelapa juga salah satu tanaman unggulan selain tanaman durian dan duku. Petani kelapa desa Arenan tertarik untuk mengolah gula kelapa dan menjadikan sebagai pendapatan utama keluarga dikarenakan pekerjaan tersebut sudah menjadi turun temurun, sehingga mereka sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini cukup beresiko terhadap keselamatan, bahkan sering memakan korban jiwa.

Sampai saat ini perajin gula kelapa semakin sulit untuk berkembang, serta meningkatkan penghasilannya. Selain usaha yang masih dalam lingkup kecil, kandungan dalam gula juga belum organik (memakai bahan kimia), petani juga tidak memiliki suara untuk mempengaruhi harga jual sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Petani juga masih banyak yang menggunakan obat seperti *natrium metabisulfit* dalam proses produksi.

Kondisi seperti ini jika tidak segera ditangani maka akan sulit untuk merubah kebiasaan petani dalam menggunakan obat. Namun keadaan sekarang dari tahun ke tahun jumlah petani mengalami penurunan secara drastis. Petani yang sudah semakin berumur dan penerusnya sudah tidak ada. Banyak anak dari sebagian petani lebih memilih untuk merantau (berkerja di luar kota). Mereka sudah tidak mau untuk *nderes* (mengambil nira) dengan berbagai alasan. Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar daerah dibandingkan untuk meneruskan *nderes*.

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (Arfianto, 2014).

Misi utama pemberdayaan masyarakat adalah bukanlah memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat, melainkan bantuan produktif yang membuat si penerima memiliki kapasitas untuk menolong dirinya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan atau belas kasihan dari orang lain (*help people to help themselves*) (Hasan & Andriany. 2015 : 111).

Pembangunan masyarakat yang dikenal dalam banyak literatur mencakup tiga model, yaitu; *economic growth*, *basic needs*, dan *people centered*. Dari ketiga model pembangunan ini, model yang ketiga menjadi pilihan dalam pemberdayaan masyarakat.

People centered merupakan model pembangunan yang mereflesikan nilai-nilai sosial yang bersifat *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Model ini lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, sehingga pembangunan berbasis masyarakat dengan menggunakan strategi pemberdayaan akan lebih tepat dalam mengubah kondisi masyarakat.

Pemberdayaan berasal dari kata *empowrment* yang memiliki makna pemberian kekuasaan karena *power* bukan hanya daya tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi juga mempunyai kekuasaan. Pemberdayaan ialah upaya memberikan daya *empowerment* kepada masyarakat. Keberadaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang melekat dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan dapat disampaikan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya (Arifin, 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang menjadi titik tolak kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupannya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya lokal sebaik mungkin. Dengan kata lain pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian (Nurjanah, 2016: 59).

Kemampuan kemandirian dilakukan dengan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya, atau dengan kata lain pemberdayaan menggunakan prinsip (*to help people to help them selves*) (Saraswati, 2017: 4). Pemberdayaan harus mampu membangun

kesadaran kritis masyarakat akan problem yang dialami dan memfasilitasi dalam upaya pemecahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Arenan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Desa Arenan dilihat dari wilayah tata guna lahan terdiri dari pemukiman, pesawahan, pegunungan, dan tanah pertanian. Penduduk Desa Arenan kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh, petani, dan pedagang. Beberapa diantaranya bekerja sebagai guru honorer dan menjadi PNS. Yang menjadi subjek yaitu petani gula kelapa di Desa Arenan dan Pendamping Lapangan dari LPPSLH.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui assesment, pendataan, sertifikasi organik, dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata atau lisan yang praktiknya terjadi secara alamiah (Sirat dkk, 2020: 3297). Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian di sajikan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran LPPSLH dalam pemberdayaan penderes, proses pemberdayaan, dan upaya dalam memberi pengetahuan serta bertambahnya pendapatan penderes.

Adapun metode kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan *assesment* terhadap desa yang sudah ditentukan untuk memperoleh sample data dan keadaan yang terjadi di desa tersebut. (2) Pendataan terkait berapa banyak jumlah penderes (petani gula kelapa) yang masih aktif dan mau untuk berproses. (3) Sertifikasi organik di mana keadaan lahan, dapur, dan cara mengolah nira itu dengan menggunakan alat yang sudah disediakan agar menjadi lebih higienis. (4) Pendampingan dilakukan untuk pelatihan pembuatan gula kelapa organik (gula semut).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil LPPSLH

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan hidup (LPPSLH) adalah Organisasi Non-Pemerintah yang dirintis sejak 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan intelektual di Purwokerto. Pada tanggal 28 Februari 1987 disahkan dan dilembagakan badan hukum yang berbentuk yayasan menjadi organisasi yang profesional dan mandiri.

Visi LPPSLH adalah “Menjadi organisasi yang profesional dan mandiri mampu mendorong terbangunnya gerakan sosial menuju keadilan dan demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan interdependensi”. Sedangkan Misinya adalah (1) Mengefektifkan pengelolaan sumberdaya kelembagaan untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. (2) Membangun citra dan memperluas jaringan kerja basis kemandirian lembaga.(3) Mengembangkan advokasi dan pendidikan kewarganegaraan menuju penguatan organisasi rakyat sebagai motor gerakan sosial. (4) Mengembangkan sistem kelembagaan yang profesioanal dengan mengembangkan fungsi-fungsi administrasi, SIM dan keuangan yang efektif dan akuntabel.

LPPSLH memiliki beberapa program di dalamnya antara lain :

Program perkotaan dan kependudukan

LPPSLH lahir sebagai wujud keprihatinan atas kondisi kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat terutama kaum miskin dan marginal di perkotaan. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktifitas pendampingan komunitas miskin serta memfasilitasi pengembangan infrastruktur dasar komunitas miskin kota. LPPSLH memegang keyakinan bahwa pemberdayaan masyarakat akan terwujud manakala masyarakat telah memiliki kesadaran kritis dan mampu memahami kondisi serta memperjuangkan haknya. Terutama hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan mendapatkan kesempatan kerja.

Program Research and Development

Bidang penelitian atau riset memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengkaji pengembangan kapasitas, baik di tingkat

masyarakat maupun kelembagaan secara simultan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Program Pedesaan dan Kewirausahaan Sosial

Periode tahun 1998-2014, program pedesaan dan kewirausahaan sosial mengalami perluasan dari aspek isu, program, wilayah dan strategi pelaksanaannya. Jika semula lebih pada pengembangan gula semut, kini sudah merambat pada pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan sosialnya. LPPSLH bekerjasama dengan FADO/VECO Belgia, MFP – Dfid, Partnership of Governance Reform – UNDP, Ausaid, Dinas.

Peran LPPSLH Dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan untuk menanggulangi dan mengentas kemiskinan. Konsep pengentasan kemiskinan mencakup pemberian akses kepada kelompok miskin, pemberdayaan agar bisa mandiri, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan akses merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan, karena warga miskin biasanya tidak memiliki kekuatan untuk membuka akses yang diperlukan. Membuka akses akan menciptakan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan (Arifin, 2016).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LPPSLH ini merupakan salah satu cara menggali serta membangkitkan sumber daya yang dimiliki penderes. Pemberdayaan bukan berarti memberikan kekuatan kepada masyarakat, melainkan mengolah potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat namun belum secara maksimal sesuai yang diinginkan. Dalam proses pemberdayaan ini, LPPSLH berperan sebagai fasilitator untuk melakukan wawasan, fasilitasi, dan advokasi. Wawasan baru bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran baru kepada penderes tentang tujuan yang belum tercapai. Edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa melakukan perubahan. LPPSLH juga ikut serta dalam dalam berdiskusi dengan masyarakat terutama dalam pendampingan kepada penderes.

LPPSLH berperan sebagai fasilitasi untuk menjembatani antara penderes dengan pasar global. LPPSLH memfasilitasi penderes untuk memperluas pemasaran produk gula hingga ke berbagai negara melalui sertifikasi gula semut. Fasilitasi bukan hanya dilakukan untuk pemasaran produk saja, LPPSLH juga menjadi perantara antara penderes dengan pemerintah daerah. Peran LPPSLH dalam advokasi ialah ikut serta dalam

perumusan program pemberdayaan bagi penderes, bentuk advokasi lainnya ialah mendorong pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan usaha gula kelapa seperti halnya mengadakan sebuah pelatihan, bantuan kepada penderes, dan memberikan jaminan keselamatan bagi penderes. Dalam jaminan keselamatan penderes di berikan sebuah kartu nama sebagai tujuan apabila dalam pengambilan air nira terjadi kecelakaan, maka dari kartu tersebut bisa untuk membantu biaya perawatan. Dalam hal ini LPPSLH berperan mendampingi penderes untuk pengajuan bantuan jaminan keselamatan kerja kepada pemerintah. Pemerintah dalam konteks ini, memiliki peran penting untuk membuka keterbatasan dan kebutuhan akses. Ketika akses dibuka lebar, maka masalah kemiskinan dapat direduksi bahkan diselesaikan. Penyelesaian masalah kemiskinan diakui dan di klaim telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengklaim bahwa selain kemiskinan diturunkan, angka pengangguran pun telah turun. Klaim yang demikian tidak serta merta diterima dan diyakini oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya yakin terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus dicapai dengan cara memperluas pemerataan (keadilan distribusi). Adil terjadi ketika hak seseorang mendapatkan porsi distribusi yang seimbang. Kunci terpenting dalam pemerataan ialah bukan dengan proteksi ekonomi, melainkan dengan mengembangkan sistem proteksi sosial. Negara diniscayakan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan pemerataan kesempatan usaha, agar setiap keluarga Indonesia memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup berkelanjutan (Arifin, 2016).

Pendapatan yang cukup merupakan indikator bahwa kemiskinan telah berhasil di tangani. Pengentasan kemiskinan akan lebih efektif melalui gerakan pemberdayaan keluarga. Sejak Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 ditetapkan dan substansi peraturannya secara detail menempatkan keluarga sebagai pelaku pembangunan, maka ruh gerakan pemberdayaan sebenarnya mulai tereujud. Wujud gerakan semakin tampak jika keluarga memiliki dan menerapkan fungsi-fungsinya yang fundamental. Keluarga idealnya memiliki dan ditopang oleh delapan fungsi pokok, yaitu; agama, budaya, cinta, kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Keluarga yang fungsional, modern, maju, profesional, berkualitas dan mandiri dapat memberdayakan masyarakat bahkan bangsanya. Gerakan di atas sekaligus menjadi strategi pemberdayaan masyarakat (Arifin, 2016).

Pemberdayaan Petani Gula Kelapa

Pemberdayaan petani ialah suatu upaya memposisikan petani

sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi serta meraih hasil pertanian. Petani harus bisa meningkatkan kualitas kemandiriannya dalam mengatasi masalah pertanian. Masalah yang dihadapi memang tidak mudah untuk diselesaikan, melainkan harus ada usaha yang nyata. Peningkatan kualitas petani terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku petani untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkualitas adalah upaya konkret dalam pemberdayaan petani. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun keberdayaan petani, diantaranya, ialah tahap pertama, edukasi petani berawal dari tindakan mikro dan lokal. Edukasi petani yang dimulai dari tindakan mikro dan bersifat lokal memiliki jangkauan makro dan bersifat global (Arifin, 2016).

Dilihat dari permasalahan yang dihadapi pada penderes, LPPSLH mempunyai suatu program untuk memberikan wawasan kepada petani terhdap penganan pembuatan gula agar harga jual menjadi lebih mahal. Program pemberdayaan petani gula kelapa atau penderes merupakan program kerja pedesaan yang dilaksanakan oleh LPPSLH. Program ini bergerak pada bidang pertanian organik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penderes.

Sasaran dari program pemberdayaan ini ialah penderes yang memproduksi gula kelapa. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pendampingan berkelanjutan dan peningkatan mutu perajin gula kelapa serta peningkatan kualitas produk gula kelapa. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan gula kelapa, LPPSLH juga bekerjasama dengan perusahaan di mana perusahaan tersebut juga memiliki ikatan dengan pasar dalam negeri dan luar negeri.

Dalam program pemberdayaan ini, LPPSLH juga mengajak pemerintah dan desa serta tokoh masyarakat untuk ikut berperan dalam mengembangkan usaha gula kelapa di Desa Arenan. Dengan bersatunya berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program masyarakat.

Masalah petani memang tidak dapat dihadapi dan diselesaikan, jika petani tidak memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Membangun bahkan mengembangkan kesadaran petani selaku pelaku ekonomi ialah strategi yang kelima dalam pemberdayaan petani. Masalah ekonomi petani kerap terjadi karena ditimbulkan oleh politik ekonomi,

sehingga tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak kuasa untuk memberdayakan masyarakat petani. Pemberdayaan yang berbasis kesadaran idealnya dapat membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik ekonomi (Arifin, 2016).

Penduduk Desa Arenan kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani gula kelapa. Mereka memilih mengolah gula merah dan menjadikan sebagai pendapatan utama keluarga dikarenakan jatuhnya kelapa butir di pasaran. Pada bulan Agustus 2019, harga kelapa jatuh sampai dengan Rp. 800,- per butir. Sebelumnya harga kelapa tua mencapai Rp. 3.800,- per butir. Hal ini menyebabkan petani mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, salah satunya menekuni usaha gula kelapa.

Dari sisi produksi, gula kelapa yang dihasilkan masih sederhana dan seragam yaitu gula kelapa cetak menggunakan potongan bambu dengan berat kurang lebih 300 gr/cerakan. Produk dijual dengan harga berkisar Rp. 8.000 – Rp. 14.000 per kilogram ditingkat pedagang pengepul.

Penetapan harga ditentukan dari pengepul, dari hasil olahan gula yang dibuat. Disaat gula sedang tidak bagus harga jual akan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan petani. Sering terjadi hal yang tidak terduga ketika pembuatan gula, seperti tampilan lembek, tidak keras, sehingga dijual dengan harga yang murah. Kurangnya pengetahuan, keamanan produk, dan kebersihan sehingga menyebabkan proses pembuatan gula kelapa kurang higienis. Dengan hal tersebut perlu adanya pendampingan terhadap petani agar dalam pengolahan gula kelapa bisa meningkat dalam kualitas maupun harga jual.

Pemasaran pertanian, menurut Dunne dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok konsumen dengan lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Proses ini mencakup aktivitas mengidentifikasi pasar sasaran, memenuhi kebutuhan konsumen dalam pasar tersebut, dan memilih kombinasi yang tepat dari strategi produk, harga, promosi dan distribusi yang dikenal sebagai bauran pemasaran (*the marketing mix*) (Maharani, 2011).

Kegiatan ini diawali dengan *assesment* dan pendataan dengan

menggal informasi dari petani terhadap bahan tambahan yang digunakan saat pembuatan gula kelapa. Dalam pembuatan gula kelapa, petani menggunakan bahan campuran selain air nira kelapa yaitu menggunakan *brangkal* (kapur), *tatal* (bagian dalam kayu nangka), kulit manggis, dan obat. Bahan tersebut digunakan sebagai pengawet nira agar tidak mudah basi. Setelah pongkor atau ember dibersihkan kemudian bahan tersebut dimasukkan sebelum ember atau tempat untuk menampung nira (pongkor) di pasang pada *mancung* (bunga) kelapa. Aktivitas mikro organisme dapat mengakibatkan penurunan kualitas air nira ditandai dengan berubahnya rasa menjadi asam, berbuih putih dan berlendir.

Sebelumnya petani melakukan pemotongan *manggar* (bunga kelapa) dan pengambilan air nira kelapa dilakukan 2 kali pada waktu pagi dan sore. Dari sisi pengetahuan terhadap penggunaan bahan pengawet yang digunakan petani itu berdampak tidak baik bagi kesehatan apabila memasukan obat terlalu banyak. Kemudian dari tim pendamping melakukan pengenalan kepada petani bahwa penggunaan bahan pengawet yang lebih baik itu tidak menggunakan bahan kimia atau obat-obatan. Terkait dari dampak terhadap bahan pangan khususnya obat yang dimasukkan ke pembuatan gula ini, petani tidak mengetahui secara pasti.

Dalam pendampingan dan sertifikasi ini bertujuan untuk membuat kesepakatan tidak menggunakan bahan yang terkontaminasi oleh kimia. Pembuatan gula diarahkan untuk memproduksi gula kelapa organik (gula semut). Dalam proses maupun pembuatan gula kelapa tidak menggunakan bahan yang terkontaminasi bahan kimia. Contohnya pada tanaman kelapa tidak dipupuk menggunakan bahan kimia, tetapi dipupuk menggunakan pupuk kandang atau biasanya menggunakan *awu* (bekas bahan bakar kayu).

Penggunaan pongkor (tempat nira) menggunakan bahan yang khusus untuk makanan atau bisa menggunakan ember yang khusus untuk menampung air nira. Tambahan pengawet yang digunakan itu masih dengan alam, contohnya *tatal* (bagian dalam kayu nangka), kulit manggis dan lainnya. Keadaan dapur yang diusahakan dalam keadaan bersih agar lebih higienis dan hasil dari produk gula akan lebih

baik. Setelah tersertifikasi dan pendampingan akan dilakukan pelatihan pembuatan gula organik. Dengan pembuatan gula organik lebih memakan waktu, namun dari harga itu jauh dari pada gula cetak. Berikut proses pembuatan gula organik (gula semut): (1) Pengambilan air nira di pohon (2) Nira hasil dari pohon di saring agar terbebas dari kotoran. (3) Nira yang sudah bersih kemudian dimasukan kedalam wajan, dipanaskan dengan api besar hingga mendidih. Saat mendidih kotoran halus akan mengapung dengan air busa nira dan harus dibuang. Agar busa air nira yang meluap tidak bertambah banyak maka dimasukan satu sendok minyak kelapa atau biasanya menggunakan parutan kelapa sedikit agar tidak meluap lagi. (4) Air nira yang sudah pekat ditandai dengan warnanya berubah menjadi kuning tua menunjukkan bahwa nira sudah tua (matang), dan proses pengadukan terus dilakukan hingga nira sampai keadaan dingin. (5) Bila sudah mulai dingin maka tahap selanjutnya di *gosrok* (diulek) menggunakan *batok* (cangkang kelapa), kemudian di ayak hingga benar benar halus.

Tahapan di atas dilakukan petani kemudian petani menyetorkan lagi kepada kelompok yang ada di Desa Arenan. Hal ini karena setiap desa memiliki kelompok atau pengepul masing-masing untuk diolah lagi. Langkah pertama yang dilakukan oleh LPPSLH di Desa Arenan ialah dengan mengatur rantai pasar. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses pasar oleh penderes.

Pada awalnya penderes hanya bisa menjual produknya ke satu pengepul karena terikat dengan sistem tukar barang. Sistem ini sangat merugikan penderes, selain menutup akses pasar penderes, sistem tukar juga menyebabkan para penderes tidak memiliki posisi tawar terhadap harga jual terhadap gula. Dengan adanya sistem tukar ini maka harga jual pada gula tergantung pada pengepul. Dengan adanya program LPPSLH diharapkan petani gula kelapa tidak lagi memikirkan harga pasar, dikarenakan harga jual gula organik bisa dikatakan dua kali lipat dibandingkan dengan harga jual gula cetak.

Program yang dilakukan LPPSLH di Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga memperoleh respon positif dari masyarakat sekitar, khususnya petani gula kelapa dalam bentuk menerima adanya pendampingan dan pelatihan serta perubahan yang

dilakukan oleh LPPSLH. Namun di sisi lain juga masyarakat mengalami kendala dalam hal usia, penderes memiliki usia rata-rata 40 tahun, dan untuk penerusnya masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pemuda untuk menjadi penderes. Mereka lebih memilih bekerja di luar kota untuk mencari pekerjaan.

Dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya: Pertama, Perubahan pengetahuan dan ketrampilan. Melalui kegiatan ini, memberikan tambahan pengetahuan terhadap petani. Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan petani bisa lebih terampil dan menimbang dampak dari bahan yang dicampurkan kedalam nira. Sehingga dapat menghasilkan gula yang lebih baik. Kedua, Memberikan tambahan pendapatan. Adanya keyakinan yang dimiliki petani bahwa bekerja menjadi penderes itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan perubahan bentuk dan bahan membuat harga jual menjadi lebih mahal dibandingkan yang cetak.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LPPSLH ini merupakan salah satu cara menggali serta membangkitkan sumber daya yang dimiliki penderes. Dalam proses pemberdayaan ini, LPPSLH berperan sebagai fasilitator untuk melakukan wawasan, fasilitasi, dan advokasi.

Wawasan baru bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran baru kepada penderes tentang tujuan yang belum tercapai. Edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa melakukan perubahan. LPPSLH juga ikut serta dalam dalam berdiskusi dengan masyarakat terutama dalam pendampingan kepada penderes.

LPPSLH berperan sebagai fasilitasi untuk menjembatani antara penderes dengan pasar global. LPPSLH memfasilitasi penderes untuk memperluas pemasaran produk gula hingga ke berbagai negara melalui sertifikasi gula semut. Fasilitasi bukan hanya dilakukan untuk pemasaran produk saja, LPPSLH juga menjadi perantara antara penderes dengan pemerintah daerah. Peran LPPSLH dalam advokasi ialah ikut serta dalam perumusan program pemberdayaan bagi penderes, bentuk advokasi lainnya ialah mendorong pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan usaha gula kelapa seperti halnya mengadakan sebuah pelatihan, bantuan kepada penderes, dan memberikan jaminan

keselamatan bagi penderes.

Masyarakat mengalami kendala dalam hal usia, penderes memiliki usia rata-rata 40 tahun, dan untuk penerusnya masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pemuda untuk menjadi penderes. Melalui pendampingan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga mendapat penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan petani. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi petani yaitu dalam hal perubahan pengetahuan, ketrampilan dan menambah penghasilan.

Daftar Pustaka

- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66.
- Arifin, S., & Izzuddin, M. A. (2016). Ekonomi lumbung dan konstruksi keberdayaan petani Muslim Madiun. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 187-212.
- Hasan S, Andriany D. (2015). Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maharani, E., Edwina, S., & Kusumawaty, Y. (2011). Pemasaran Gula Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Pendekatan Struktur, Perilaku & Penampilan Pasar. *IJAE (Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia)*, 2(1), 87-104.
- Mashuri, Maschab. (1992). Pemerintah Desa Di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Noor, Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2.
- Nurjanah, A., Karsidi, R., Muktiyo, W., & Habsari, K. (2016). Building and Empowering Community Through CSR Program In Indonesia: A Case Study of Waste Problem. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY & DEVELOPMENT*, 31(4), 57-67.
- Saraswati, G. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wirausaha Kreatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Edukasi*, 1, 1-20.
- Sirat, A. H., Hadady, H., Sirat, M. A. H., & bin Padli, J. (2020). Mapping and Identifying Halal Products of Micro, Small, and Medium

Enterprises (Msmes) in Ternate City, Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(4), 3294-3305.

Yujiro, Hayami dan Masao Kihuchi. (1987). Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia. Yogyakarta: YOI.